

**PERAN MYANMAR MENANGGULANGI PENYELUNDUPAN DAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM MENDUKUNG
PENCAPAIAN DRUG-FREE ASEAN 2015 (1998-2014)**

Oleh :

Eko Bagus Sholihin

(ekobagussholihin@gmail.com)

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

Abstract

This paper describes about the role of Myanmar's government against drug issues to support achievement Drug-Free ASEAN 2015 programme. Myanmar is the biggest producer of drugs in Southeast Asia, therefore this country has an important role to support achievement of the programme. The results of this paper shows several programmes have been adopted by Myanmar's government such as domestic policies that include 15 Years Drug Control Plan Programme, Law enforcement, and the Role of Anti-drug Agency (Central Committee of Drug Abuse Control), Foreign Policy that include International Cooperation to against drug abuse and trade, and the last working group with neighbour countries.

Keywords: Role, Myanmar, Drugs, Drug-Free ASEAN 2015.

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang peran pemerintah Myanmar menanggulangi permasalahan narkoba dalam mendukung pencapaian program *Drug-Free ASEAN 2015*. Myanmar adalah negara penghasil narkoba terbesar di Asia Tenggara, oleh karenanya negara ini memiliki peran penting dalam pencapaian program tersebut. Hasil dari artikel ini menunjukkan beberapa

program telah diterapkan oleh pemerintah Myanmar diantaranya kebijakan dalam negeri yang mencakup program *15 Years Drug Control Plan*, penerapan hukum, dan peran lembaga anti narkoba (CCDAC), kebijakan luar negeri yang mencakup kerjasama interasional menanggulangi perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, dan yang terakhir *working group* dengan negara-negara tetangga.

Kata kunci : Peranan, Myanmar, Narkoba, ASEAN Bebas Narkoba 2015

PENDAHULUAN

Arus Globalisasi dengan semakin mudahnya mobilitas perpindahan manusia dan barang dari suatu wilayah ke wilayah lain juga memicu meningkatnya aksi-aksi kejahatan yang melintas batas suatu negara (*transnational crime*) diantaranya pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*), perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi, perdagangan gelap senjata api, dan penyelundupan dan perdagangan narkoba (Isharyanto, 2010). Hal serupa juga terjadi di wilayah negara-negara ASEAN. Model perdagangan liberal dan masih lemahnya penerapan hukum di negara-negara ASEAN menimbulkan celah-celah baru bagi mafia narkoba untuk melakukan aktifitasnya dari mulai produksi, pengolahan hingga proses distribusi untuk lokal dan ekspor ke negara-negara lain. Dalam artikel ini, penulis akan meneliti tentang problematika narkoba di Myanmar dan peran pemerintah Myanmar dalam menanggulangi isu ini.

Kejahatan Perdagangan dan penyelundupan narkoba memiliki ciri-ciri terorganisir, dilakukan oleh sindikat-sindik yang saling terhubung, memiliki dukungan dana yang besar untuk produksi hingga distribusi, memanfaatkan teknologi canggih berbasis informasi dan telekomunikasi, menyuap petugas terkait misalnya imigrasi, modus distribusi menggunakan kurir yang melibatkan warga negara asing yang tentu sudah memiliki rencana yang rapi sebelum kegiatan yang melewati batas Negara tersebut dilakukan.

Isu narkoba di Myanmar seringkali tertutupi oleh isu-isu Hubungan Internasional lainnya yang dianggap lebih krusial seperti isu perang saudara, isu demokratisasi, dan isu diskriminasi etnis islam di Rohingya. Padahal, Myanmar fakta-fakta dibawa ini menunjukkan isu narkoba adala isu yang penting untuk diberikan perhatian yang besar oleh Myanmar dan dunia. sejak lama telah menjadi produsen opium terbesar di Asia Tenggara dan kedua di Dunia setelah Afganistan. Setidaknya Myanmar menyumbang 30% dari total produksi opium dunia. Dalam laporan *United Nation Office and Drug and Crime (UNODC)*, hingga tahun 2000 terdapat sekitar 200 ribu hektar lahan opium di Myanmar, meski sempat menurun drastis hingga 20 ribu hektar pada 2006, namun kembali meningkat hingga 60 hektar pada taun 2014. Di Myanmar, sebagian besar kegiatan budidaya opium di bukit-bukit dan pegunungan di Negara Bagian Shan dan Negara Bagian Kachin. Banyak dari warga daerah tersebut yang menjadikan budidaya opium sebagai mata pencaharian sehari-hari. Karena akses berobat yang sulit, opium juga seringkali dijadikan obat untuk pengilang rasa sakit.

Myanmar juga salah satu negara segitiga emas (*golden triangle*) yang mana merupakan salah satu pusat produksi opium dunia. Segitiga Emas adalah kawasan di bagian utara Asia Tenggara yang meliputi Myanmar, utara Laos dan bagian utara Thailand seluas 950.000 km² diantara pertemuan sungai Ruak dan sungai Mekong. Disebut emas karena kekayaan kawasan ini berasal dari emas hitam atau opium

Lahan Opium di kawasan Golden Triangle (Segitiga Emas)

Negara	1998	2006	2007	2014
Myanmar	130.300	21.500	27.700	57.600
Laos	26.800	2.500	1.500	6.200
Thailand	1.486	157	205	265*
Jumlah	157.900	24.157	29.405	64.065

Ket. Luas lahan dalam hektar

*Data tahun 2013, karena data tahun 2014 di Thailand belum di rilis.

Sumber: UNODC, *Opium Poppy Cultivation in Southeast Asia: Myanmar, Laos, dan Thailand*.

Dari jumlah lahan opium tersebut (2006-2014), Myanmar mampu memproduksi 360 ton opium setiap tahun yang siap ekspor atau hampir 40% produksi opium dunia. Data dari *World Drug Report 2015* oleh UNODC menyebutkan pada tahun 2013 setidaknya sekitar 250 juta manusia yang berumur antara 15-64 tahun menjadi pengguna narkoba, diantaranya sekitar 27 juta telah mengalami masalah-masalah yang ditimbulkan oleh memakai narkoba seperti ketergantungan ringan hingga berat (UNODC, 2015) (artinya 1 dari 10 pengguna narkoba telah terkena masalah). Hal ini diperburuk ketika diketahui bahwa hanya 1 dari 6 pecandu narkoba yang memiliki akses untuk berobat, karena sebagian negara di Dunia (Asia, Afrika, dan Amerika Latin) belum memiliki fasilitas yang memadai terkait pengobatan narkoba. Akibatnya pada tahun 2013 (setiap tahun hampir sama) sekitar 187 ribu manusia meninggal dunia karena penggunaan narkoba (UNODC, 2015).

Di Myanmar, menurut data dari UNODC, Dari 51 juta penduduk Myanmar ada 70.000 warga yang terdaftar secara resmi sebagai pecandu narkoba. Namun mereka memperkirakan total pecandu narkoba mencapai 300.000 orang dikarenakan banyak yang takut untuk mendaftar kepada pemerintah (sebagai syarat untuk mendapat rehalibitasi dari pemerintah) karena takut dengan tuntutan atau ancaman hukuman penjara dari negara (UNODC, Myanmar Country Profile, 2005).

Myanmar sebagai negara berdaulat yang memiliki warga negara, Mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keselamatan warga negaranya dari berbagai ancaman keamanan baik yang datang dari luar maupun dalam negeri termasuk dari ancaman narkoba. Selain itu, Myanmar juga menjadi salah satu negara anggota ASEAN. ASEAN memiliki tanggung jawab untuk bekerjasama dengan negara-negara anggotanya dalam menanggulangi masalah penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba. Dalam menghadapi permasalahan narkoba, ASEAN telah membuat kesepakatan terkait penciptaan kawasan ASEAN yang bebas dari narkoba. Kesepakatan tersebut telah dilakukan sejak tahun 1998 setelah

dilaksanakannya Manila pada tahun 1998 yang menghasilkan “*Joint Declaration for a Drug-Free ASEAN* ”. Salah satu hasil deklarasi bersama ini adalah kesepakatan untuk menjadikan ASEAN sebagai wilayah bebas narkoba pada tahun 2015. Sebagai salah satu negara yang menandatangani deklarasi *Drug-Free ASEAN 2015*, Myanmar memiliki tanggung jawab untuk ikut berupaya aktif dalam memberantas narkoba di Myanmar secara khusus, dan secara umum di kawasan Asia Tenggara guna tercapainya program “*Drug-Free ASEAN 2015*”.

Kerangka Dasar Teori

Dalam artikel ini kerangka dasar teori yang penulis gunakan untuk menjelaskan permasalahan adalah Teori Peranan dan Teori Negara Lemah (*Wake State Theory*).

Menurut Mohtar Mas'oeed dalam bukunya *Studi Hubungan Internasional (Tingkat Analisa dan Teorisasi)*, Peranan adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Teori Peranan menegaskan bahwa “*Perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peran politik*”. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan sedang dipegang oleh aktor politik (Mas'oeed, 1989).

Soejono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar* mengemukakan definisi yaitu “Peranan merupakan (role) aspek dinamis (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung dengan yang lainnya, dan begitu pula sebaliknya” (Soekanto, 2005:243).

Dalam konteks Myanmar, Pemerintah Myanmar berperan sebagai aktor yang menjalankan pemerintahan dan wajib melakukan hak dan kewajibannya. Salah satu kewajiban dari pemerintah Myanmar adalah menjaga keamanan warga negaranya dari ancaman kejahatan narkoba. Peran yang dilakukan negara dapat berupa pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan larangan narkoba, terjun langsung ke lapangan untuk menangkap para pelaku kejahatan narkoba, hingga

melakukan kerjasama dengan negara lain atau lembaga internasional untuk memberantas narkoba, karena mafia narkoba tidak lagi hanya beroperasi pada satu negara, namun sudah memiliki jaringan internasional yang terkoneksi di setiap negara yang menjadi tempat produksi atau transit dari penyelundupan narkoba. Salah satu program Myanmar aktif dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk menciptakan kondisi ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015. Dengan begitu mereka bisa mengusahakan keamanan warga negara Myanmar dari bahaya narkoba.

Kekuatan negara merupakan sebuah konsep yang relatif, yang salah satunya bisa dilakukan dengan mengukur antara kemampuan negara (*state's ability*) dan kemauan negara (*state's willingness*) untuk menyediakan political goods yang dibutuhkan masyarakat seperti 7 keamanan fisik, institusi politik yang legitimate, manajemen ekonomi, dan kesejahteraan sosial (Jackson, 1990).

Weak States memiliki rangkaian kesatuan yang besar negara yang meliputi: lemah yang sudah menjadi sifatnya (*inherently weak*) dikarenakan keterbatasan geografis, fisik, atau ekonomi fundamental. Pada dasarnya kuat, tetapi secara situasional lemah karena aktor-aktor internal penentang negara (*internal antagonism*), kesalahan manajemen pemerintahan, keserakahan, despotism (kondisi di mana negara dipimpin oleh pemimpin yang kejam dan bengis), atau serangan-serangan eksternal, dan perpaduan keduanya. *Weak states* secara tipikal mengandung pertikaian interkomunal antar kelompok etnis, agama, bahasa yang belum menjadi nampak brutal dan bengis. Tingkat kejahatan urban cenderung selalu lebih tinggi dan meningkat. Di dalam *weak states*, kemampuan untuk menyediakan kadar yang sesuai terhadap alat-alat politik menjadi hilang atau berkurang atau kurang berharga dan kurang penting. Jaringan infrastruktur fisik menjadi semakin memburuk. Sekolah dan rumah sakit menunjukkan tanda-tanda tidak terurus, terutama di luar kota-kota besar. Tingkat korupsi yang tinggi dan GDP per kapita dan indikator-indikator ekonomi yang lain telah jatuh atau merosot (Jackson, 1990).

Jika mencoba menghubungkan indikator-indikator weak state diatas dengan fenomena yang terjadi di Myanmar, banyaknya pemberontakan

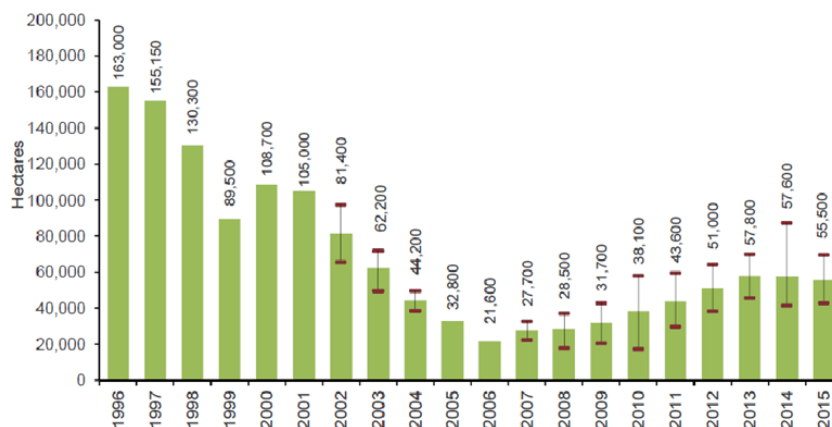
menandakan pemerintahan yang tidak legitimate, pembangunan ekonomi tidak merata, maraknya korupsi, tindak kejahatan yang tidak mampu diantisipasi menandakan Myanmar termasuk salah satu *weak state*. Problematika narkoba tidak terlepas dari kejahatan-kejahatan lainnya. Para pemeberontak memanfaatkan industri narkoba untuk mendapatkan modal. Oknum pemerintah dan junta militer mencari keuntungan yang begitu banyak dari bisnis nakroba. Melalui penelitian ini akan terlihat bagaimana efektifitas dan keberhasilan Myanmar sebagai *weak state* dalam menanggulangi narkoba.

PEMBAHASAN

Peran Myanmar dalam menannggulangi narkoba terbagi menjadi kebijakan dalam negeri kontra narkotika dan melalui kerjasama luar negeri baik secara bilateral dengan negara lain atau dengan organisasi internasional.

Potensi Produksi Narkoba di Myanmar

Berdasarkan data yang dirilis oleh UNODC sejak tahun 1996 hingga 2015, total luas lahan opium di Myanmar secara dinamis terkadang menurun dan meningkat pada angka yang relatif tinggi untuk ukuran tanaman ilegal dan dilarang oleh undang-undang. Pada tahun 1998 luas lahan opium di Myanmar mencapai 130 ribu hektar, kemudian sempat menurun drastis hingga 21 ribu hektar pada tahun 2006, namun kemudian kembali meningkat hingga tahun 2014 seluas 55 ribu hektar.



Sumber : from 1996 to 2001: United States Government; since 2002: GOUM/UNODC.

Opium yang ditanam di wilayah pegunungan Shan dan Kcahin tumbuh subur karena iklim dan cuaca yang memang cocok dengan standar tanaman poppy. Rata-rata opium di wilayah ini mampu menghasilkan sekitar 11 kg (Lihat tabel)opium per hektar walaupun jumlah ini berubah secara fluktuasi dengan mengikuti beberapa indikator lain berupa persiapan lahan, irigasi dan tanah, dan faktor-faktor lain. Jika dihitung, pada tahun 2014 terdapat sekitar 57 ribu hektar opium, berarti pada tahun 2014 sekitar 600 ton opium atau sekitar 60 ton opium kering siap jual.

Didalam negeri, opium basah dihargai \$240/kg dan opium kering seharga \$340/kg (harga ditentukan oleh mafia). Total keuntungan yang dihasilkan dari penjualan opium bisa mencapai US\$ 144 juta. Akan berbeda ketika opium ini di ekspor, harga yang berlaku bisa mencapai US\$1.800/kg (UNODC, 2014) maka akan lebih banyak keuntungan yang diperoleh. Motif ekonomi ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab banyaknya pihak yang terlibat didalam bisnis ini termasuk kelompok pemberontak, militer dan oknum pemerintah (Fuller, Profits of Drug Trade Drive Economic Boom in Myanmar - The New York Times, 2015)

Kebijakan Dalam Negeri

Pemerintah Myanmar menduga bahwa isu narkoba berkaitan erat dengan isu konflik etnis dan pemberontakan di wilayah perbatasan. Hal tersebut menjadikan pemerintah Myanmar sejak kemerdekaan menjadikan konflik etnis dan pemberontakan sebagai prioritas utama dan isu narkoba menjadi yang kedua dibahas. Namun, pasca 1988 Pemerintah melihat fakta bahwa isu konflik etnis tidak berbanding lurus dengan isu narkoba. Sehingga pemerintah kemudian menjadikan isu narkoba sebagai prioritas yang sama penting untuk diberantas dan menggagas dua pendekatan dalam pemberantasan narkoba, yaitu:

1. Menunjuk upaya eliminasi narkoba sebagai tugas nasional dan melaksanakan strategi komprehensif.
2. Pengembangan dan peningkatan standar hidup dari etnis perbatasan dan penghapusan semua budidaya opium (ODPC, 2001).

Dari dua pendekatan diatas, pemerintah mulai mencanangkan kebijakan-kebijakan kontra narkoba. Berikut adalah beberapa kebijakan dalam negeri yang diterapkan oleh pemerintah Myanmar.

Pada tahun 1999, pemerintah Myanmar bertekad mencapai Myanmar yang bebas narkoba pada tahun 2014, yang kemudian disebut Program *15 Years Drug Control Plan (1999-2014)*. Program ini dibagi kedalam tiga fase pelaksanaan. Fase pertama, prioritas utama ditujukan kepada pemberantasan budidaya opium. Fase berikutnya Pemerintah akan menyesuaikan prioritas terhadap beberapa fokus: tentang rehabilitasi pengguna narkoba, pembentukan unit satuan tugas anti-narkoba, partisipasi masyarakat lokal dan implementasi pengawasan terhadap narkoba, dan kerjasama internasional. Rencana pengendalian narkoba akan dialamatkan ke 51 kota kecil meliputi 55.112 mil persegi dan berpenduduk sekitar 3,8 juta jiwa (UNODC, 2005).

Sebagai landasan hukum dalam pemberantasan narkoba, hingga sekarang Myanmar menggunakan UU Bahaya Narkoba narkoba yang berisi 13 bab yang melarang budidaya, produksi, pengolahan, perdagangan, dan penjualan narkoba dengan ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Myanmar juga menjadikan *Central Committe of Drug Abuse Control (CCDAC)* sebagai lembaga khusus anti narkoba yang kemudian menjadi lembaga terdepan dalam memberantas narkoba dengan bekerja sama dengan penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan juga dengan bantuan militer.

Melalui beberapa program dan lembaga hukum diatas, Myanmar melakukan upaya-upaya kongkrit di lapangan baik bersifat mengurangi suplai dengan penyitaan dan investigasi serta tindakan preventif dengan melakukan kampanye, seminar dan pertunjukan tentang bahaya narkoba kepada pelajar dan pelatihan kepada guru dan orang tua. Melalui data yang dirilis oleh CCDAC dengan bekerja sama dengan UNODC dan *Lao National Committe for Drug Control*, Myanmar telah menyita obat-obatan terlarang antara lain opium dan heroin. Selama periode tahun 1998 hingga 2015 Pemerintah Myanmar telah menyita 26.582 kg opium dengan rata-rata 1.477 kg/tahun, begitu pula heroin sebesar 6.155 kg telah berhasil disita oleh pemerintah pada periode yang sama.

Pemerintah Myanmar juga memberikan pengobatan dan rehabilitasi untuk para pecandu narkoba.

Sebagai analisa perbandingan, penyitaan yang telah dilakukan oleh Myanmar sebanyak 26 ribu kg opium sejak 1998 hingga sekarang hanya sebagian kecil dari total opium yang berpotensi besar dihasilkan di Myanmar. Pada tahun 2014 saja Myanmar berpotensi menghasilkan 60 ton opium kering. Disaat yang sama pemerintah hanya mampu menyita 1 ton opium. Artinya ada 59 ton opium yang kemudian diselundupkan keseluruh dunia. Myanmar juga telah berperan dalam mengurangi jumlah lahan opium di Myanmar, namun sebaliknya dari tahun 2006 hingga 2014 total luas lahan opium di Myanmar malah meningkat drastis hingga 3 kali lipat. Hal ini juga menandakan pemerintah Myanmar belum berhasil dalam dua upaya tersebut. Begitu juga dalam upaya pengobatan serta rehabilitasi pengguna narkoba. Yang berhasil di rehabilitasi hanya sebagian kecil dari pengguna narkoba yang banyak tidak terdata, terutama yang berada di wilayah terisolasi seperti Shan dan Kachin

Kebijakan Luar Negeri

Dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengontrol, mengurangi, dan menanggulangi problematika narkoba Pemerintah Myanmar melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri baik kerjasama bilateral dengan negara-negara lain dan oraginasi internasional ataupun ikut tergabung dalam suatu kerjasama multilateral dibawah suatu naungan IGO atau INGO baik ditingkat regional Asia Tenggara maupun Global dibawah PBB.

1. Kerjasama Bilateral

Dalam proses menanggulangi kejahatan narkoba, pemerintah Myanmar telah banyak menerima bantuan dari negara-negara lain dan Organisasi Internasional yang ikut konsen dan peduli terhadap problematika narkoba di Myanmar. Diantara kerjasama bilateral tersebut dilaksanakan dengan China, Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan European Comission.

China mulai aktif dalam upaya pemberantasan narkoba setelah dilakukan kongres internasional yang digagas oleh UNODC Asia Pasifik di Bangkok tahun

2000 dan menghasilkan suatu *plan of action* yang kemudian disebut ACCORD. Melalui ACCORD China aktif dalam program empat pilar yaitu meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba, mengurangi konsumsi narkoba, memperkuat penerapan hukum, mengurangi budidaya dan produksi opium dan tanaman bahan baku narkoba lainnya (Union, 2015).

Yang kedua adalah Jepang. Pemerintah Jepang telah melakukan program substitusi tanaman yaitu membantu masyarakat yang sebelumnya membudidayakan opium untuk beralih ke tanaman lain. Program ini bertujuan untuk memberantas budidaya opium dan upaya mengurangi kemiskinan di utara Negara Bagian Shan sejak tahun 1997 melalui JICA (*Japan International Cooperation Agency*). Dari april 2005 hingga mei 2011 melakukan proyek pembangunan sosial-ekonomi komprehensif di Kokang Self-Administrated Zone (salah satu wilayah administratif di utara Shan) senilai US\$11 juta. Proyek ini mencakup pembangunan infrastruktur, pertanian, peningkatan mata pencaharian, kesehatan, dan pendidikan untuk meringankan masyarakat Kokang dari darurat kemiskinan setelah dilakukannya pemberantasan budidaya opium di daerah tersebut (Union, 2015).

Berikutnya adalah kerjasama dengan Australia. Pemerintah Australia melalui *Australian Federal Police (AFP)* terus mendukung upaya Myanmar memberantas narkoba dengan fokus police-to-police yang juga fokus di salah satu wilayah segitiga emas, yaitu Negara Bagian Shan. Australia juga berkontribusi besar bagi upaya melawan HIV/AIDS melalui program yang didukung oleh 3MDG Fund oleh pemerintah Myanmar. Dana tersebut difokuskan di wilayah Sagaing, Magway, Shan dan Kachin. Australia Melalui *Livelihood and Food Security Trust Fund (LIFT)* bersama negara AS, Selandia Baru, dan beberapa Negara Uni Eropa, telah menginvestasikan sekitar US\$ 200 juta guna meningkatkan ketersediaan pangan dan ketersediaan mata pencaharian bagi penduduk yang sangat miskin di Myanmar. Negara bagian Shan adalah target utama dari program LIFT. Australia juga tengah menginvestasikan dana sebesar 12 juta dollar Australia dalam program penelitian mata pencaharian dan makanan bagi masyarakat pedesaan melalui lembaga *Australian Centre for International*

Agricultural Research (ACIAR). Penelitian ini pada akhirnya tergabung dalam kegiatan mengembangkan mata pencaharian di seluruh Myanmar (Union, 2015).

Kemudian adalah kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat. Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat selalu berusaha berperan dalam setiap upaya negara-negara di dunia dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Amerika Serikat memberikan bantuan senilai US\$ 2 juta melalui *U.S. Department of State, International Narcotics and Law Enforcement (INL), Bureau for Drug Demand Reduction, Interdiction, and Law Enforcement Capacity Building*. Selain program dari INL tersebut, *The Drug Enforcement Administration (DEA)* juga mendukung upaya Myanmar memberantas narkoba melalui kerjasama dengan *Central Committee for Drug Abuse Control (CCDAC)* atau dengan Kepolisian Myanmar-Divisi Penegakan Narkoba. Program Kontra Narkotika oleh INL mendukung pengurangan permintaan narkoba dalam bentuk: Pertama melakukan survey pengguna narkoba diseluruh wilayah Myanmar dengan bekerja sama dengan UNODC. Kedua melaksanakan Konferensi Pengurangan Permintaan Narkoba pertama dengan UNODC, WHO, *Colombo Plan*, dan CCDAC serta Kementerian Kesehatan Myanmar. Dan ketiga Melaksanakan pelatihan dan menyediakan pengobatan bagi pemakai narkoba dengan bekerja sama dengan *Colombo Plan* (Union, 2015).

Yang terakhir adalah kerjasama dengan *European Comision*. Bentuk kerjasama dari *European Comission* terhadap Myanmar melalui kerjasama EC-UNODC. EC mulai ikut terlibat dalam upaya memberantas narkoba di Myanmar sejak tahun 2003. Dua program dicanangkan dengan tujuan mengurangi penggunaan heroin dan opium dengan metode suntik dan konsekuensi yang berbahaya bagi penggunanya pada periode 2003-2008. EC telah berkontribusi dalam mengurangi penyebaran HIV dan mengurangi dampak dari HIV dan AIDS di Myanmar dengan mempromosikan tentang perilaku hidup sehat dan meningkatkan pelayanan komprehensif terutama bagi pengguna narkoba suntik. *European Comission* juga mendukung program UNODC terkait ketahanan pangan dan pengurangan budidaya opium, dan mengurangi tingkat kemiskinan akibat itu. Program ini awalnya ingin dilaksanakan di kota kecil Pinlaung, namun proyek

tersebut dipindah ke kota kecil Hopong sejak UNODC menolak MOU unruk melaksanakan proyek ditempat yang diusulkan. Program ini sempat mengalami penundaan hingga mulai dijalankan pada awal tahun 2011. *European Comission* juga menjadi salah satu donatur dalam program bantuan yang dilakukan oleh LIFT (Union, 2015).

2. Kerjasama dengan Organisasi Internasional

Status kejahatan *drug trafficking* adalah kejahatan transnasional yang melibatkan banyak aktor pada lebih dari satu negara pula. Karena setiap negara hanya memiliki wewenang untuk menindak pelaku kejahatan narkoba di wilayah negaranya, sehingga dibutuhkan kerjasama *dengan International Governmental Organization* baik ditingkat regional maupun global yang bisa mewadahi kerjasama dengan negara-negara yang memiliki program yang sama. Berikut adalah organisasi yang mana Myanmar tergabung didalamnya untuk menanggulangi problematika narkoba, yaitu *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD)*, *ASEAN China Cooperative Operations in response to Dangerous Drugs (ACCORD)*, *United Nation Officials on Drugs and Crime (UNODC)*. dan working group dengan negara-negaratetangga yang berbatasan langsung dengan Myanmar.

ASOD merupakan produk dari kerjasama dan komitmen negara-negara ASEAN untuk menanggulangi isu narkoba di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk tahun 1972. ASOD memiliki empat kelompok kerja antara lain pendidikan dan pencegahan, perawata dan rehabilitasi, penegakan hukum, dan penelitian. Dalam setiap agenda pertemuan ASOD, selalu melibatkan peran dari interpol, dan badan PBB yang konsen terhadap isu narkoba yaitu UNDP yang kemudian diserahkan kepada UNODC. Deklarasi *Drug-Free ASEAN* pertama kalin dicanangkan dalam pertemuan menteri luar negeri negara-negara ASEAN pada tahun 1998. Yang kemudian dalam pelaksanaannya ASOD terus mengawasi progres pencapaian dari program tersebut. Pertemuan demi pertemuan juga rutin dilakukan oleh ASOD dengan perwakilan negara-negara ASEAN. Setelah pertemuan tahun 2000, dilaksanakan kembali pertemuan di Jakarta untuk meninjau perkembangan pemberantasan narkoba di ASEAN dan diputuskan

rekomendasi-rekomendasi untuk kemudian disahkan dalam AMMMTC pada tahun yang sama di Brunei yang isinya menentukan target dan jadwal khusus rencana kerja mereka. Setelah itu, *ASEAN Leaders' Declaration on Drug-Free ASEAN 2015* dilaksanakan di Phnom Penh tahun 2012 yang menghasilkan tekad kepala negara di ASEAN untuk merealisasikan ASEAN bebas narkoba 2015 (UNODC, 2008).

ACCORD menjadi salah satu action plan yang dibentuk dan disahkan dalam Konferensi Internasional di Bangkok bertajuk "*In Pursuit of a Drug-Free ASEAN and China 2015*" tahun 2000 yang digagas oleh UNODC, ASEAN dan negara-negara Asia Pasifik lainnya yang juga merupakan tindaklanjut dari program ASEAN bebas narkoba 2015. ACCORD memiliki empat pilar utama action plan antara lain promosi bahaya narkoba, pengurangan permintaan (*demand reduction*), penegakan hukum, dan pembangunan ekonomi alternatif yang dalam pelaksanaannya dibentuk 10 divisi dan sub tema yaitu pengurangan suplai, pengurangan permintaan, peran negara, kerjasama regional, pencegahan dan pendidikan, pengobatan dan rehabilitasi, mengontrol bahan kimia, pembangunan alternatif dan pengobatan HIV/AIDS. Setiap tahunnya dilakukan suatu pertemuan untuk memotitor sejauh mana progres yang telah dicapai (UNODC, 2008).

UNODC adalah salah satu lembaga dibawah PBB yang bertujuan membantu negara-negara anggotanya untuk mengatasi ancaman keamanan yang bersumber dari narkoba, kejahatan, dan terorisme. Sejak didirikan tahun 1997, UNODC mulai berkontribusi pada tahun 2000 yaitu menggagas Kongres Internasional se Asia Pasifik di Bangkok yang kemudian melahirkan ACCORD. Untuk mendukung penyediaan lapangan kerja alternatif, UNODC memberikan bantuan kepada mantan petani poppy yang berada dalam keadaan darurat pangan karena kehilangan mata pencaharian lewat program pelatihan praktek pertanian dengan tanaman yang baru seperti padi dan gandum. UNODC bekerja sama dengan Pemerintah Myanmar juga melakukan Myanmar *Illicit Crop Monitoring Programme (ICMP)* sejak tahun 2003. Program ini menyediakan survey opium tahunan yang memberikan informasi sejauh mana program-program

penanggulangan narkoba oleh Myanmar, ASEAN, PBB dan pihak lain yang terkait bisa berjalan efektif (Union, 2015) .

Pemerintah Myanmar berfikir masih ada celah-celah bagi pelaku kejahatan narkoba, seperti daerah-daerah perbatasan yang mana harus dilakukan upaya secara spesifik antar negara yang terlibat dalam mengatasinya. Oleh karenanya Myanmar menjalin kerjasama yang tergabung dalam sebuah kelompok kerja dengan beranggotakan Myanmar bersama Kamboja, China, Laos, Thailand, dan Vietnam yang kemudian disebut Greater Mekong Sub-Regional (GMS) yang juga didukung oleh *United Office on Drugs and Crime (UNODC)*. Enam negara ini sepakat untuk membuat MOU yang berisi *Sub-Region Action Plan (SAP)* tentang upaya mengontrol narkoba pada tahun 1995. MOU ini dibahas dan diperbaharui dalam setiap pertemuan dua tahunan. Dalam pertemuan pada tahun 2011 di Laos, negara-negara anggota sepakat membentuk lima bidang kerjasama tematik yaitu kerjasama antara lembaga penegakan hukum, kerjasama internasional dibidang yudisial, pengurangan permintaan narkoba, drugs dan HIV/AIDS, dan yang terakhir adalah pembangunan alternatif berkelanjutan.

KESIMPULAN

Isu penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba telah menjadi fokus negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung didalam ASEAN untuk bekerja sama secara sustainable dan saling membantu untuk menanggulangi problematika ini. Sebagai upaya kongkrit, pada tahun 1998 pertemuan menteri-menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN menyepakati program ASEAN yang bebas narkoba yang kemudian disebut *Drug-Free ASEAN 2015*.

Myanmar adalah negara penghasil narkoba jenis opium terbesar di Asia Tenggara dan terbesar kedua di dunia dibawah Afganistan. Oleh karenanya pemerintah Myanmar menyadari untuk menciptakan ASEAN yang bebas narkoba haruslah dimulai dari Myanmar yang bebas narkoba. Pemerintah Myanmar juga menyadari bahwasannya pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin keamanan warga negaranya dari narkoba baik melalui kebijakna-kebijakan kontra narkoba atau melalui pemberdayaan hukum. Sehingga pemerintah mulai

mencanangkan beberapa program kongkrit pemberantasan narkoba yang mencakup kebijakan dalam negeri, kebijakan luar negeri, dan working group.

Setelah deklarasi program *Drug-Free ASEAN 2015* tahun 1998, pemerintah Myanmar pada tahun yang sama memperkenalkan program yang disebut *15-Years Drugs Control Program (1999-2014)* yang dilakukan kedalam tiga fase dan berfokus pada pemberantasan budidaya opium, pengobatan dan rehabilitasi, pembentukan unit satuan-tugas, keikutsertaan masyarakat lokal dan implementasi pengawasa narkoba dan juga kerjasama internasional. Secara praktek di lapangan, sejak 1998 Pemerintah juga secara berkelanjutan melakukan penyitaan narkoba, pemberantasan budidaya opium, melakukan upaya preventif melalui edukasi dan pendidikan, memperbaharui fasilitas pengobatan dan rehabilitasi termasuk HIV/AIDS, dan mengembangkan ekonomi berkelanjutan di daerah perbatasan dan ditujukan kepada mantan petani opium. Dalam menanggulangi narkoba, pemerintah Myanmar juga menggunakan upaya hukum, dengan memaksimalkan dan memperluas peran *Central Committe of Drugs Abuse Control (CCDAC)* sebagai garda terdepan penegakan hukum di Myanmar yang juga bekerja sama dengan polisi nasional, intelijen negara, dan militer.

Myanmar juga telah melakukan kerjasama Bilateral dengan beberapa negara dengan program-program yang berbeda disetiap kerjasama, diantaranya China, Jepang, Australia Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Myanmar juga ikut berperan aktif dalam beberapa Organisasi Internasional yang konsen dalam menangani problematika narkoba. Di kawasan ASEAN, ada ASOD yang juga pencetus program *Drug-Free ASEAN 2015*. Menindaklanjuti program ASOD yang belum ada rencana kerja secara kongkrit, dibentuk ACCORD (*ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs*) yang beranggotakan negara ASEAN+China dengan program empat pilar penanganan narkoba yaitu sosialisasi, mengurangi konsumsi, upaya penegakan hukum dan pengurangan budidaya opium. Myanmar juga menjadi salah satu negara anggota UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*) yang merupakan badan PBB khusus menangani narkoba dan kejahatan. Selain program teknis, UNODC selalu menyediakan data dan laporan tahunan terkait progres pemberantasan narkoba.

Suatu *Working Group* juga dibentuk atas kesamaan masalah yang melewati lintas batas negara. Oleh karenanya Myanmar bersama Kamboja, China, Laos, Thailand, dan Vietnam membuat suatu MOU pemberantasan narkoba yang kemudian disebut *Sub-Region Action Plan (SAP)* yang dibentuk sejak tahun 1993, kemudian rutin melakukan pertemuan dua tahunan guna membahas dan merevisi SAP dan kemudian diimplementasikan selama dua tahun sebelum diperbaharui lagi pada dua tahun berikutnya.

Tahun 2015 adalah tenggang waktu yang ditetapkan untuk mencapai Myanmar yang bebas narkoba sebagaimana tercantum dalam program 15 Years Drug Control Plan. Begitu juga tahun 2015 adalah batas waktu untuk mencapai ASEAN yang bebas narkoba. Melihat indikator-indikator yang menentukan keberhasilan dari program ini, dimana lahan opium masih luas bahkan meningkat sejak 2006, begitu juga kemampuan pemerintah dalam menangkap pelaku dan menyita narkoba juga masih minim, serta angka penderita ketergantungan narkoba dan penderita HIV/AIDS masih relatif tinggi. Memperlihatkan bahwa peran dan upaya yang telah dilakukan oleh Myanmar dalam menanggulangi narkoba belum efektif dan juga belum berhasil.

BIBLIOGRAFI

- Ariwibowo, K. (2014, January 3). *Heroin*. Dipetik Maret 3, 2016, dari Informasi dan Edukasi Narkoba Humas BNN: <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/01/03/835/heroin>
- atlas.media.mit.edu. (2013). *The Observatory OF Economic Compelxity*. Dipetik februari 2016, dari OEC: <http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/mmr/>
- BNN. (2012, 04 02). *Ganja*. Dipetik maret 04, 2016, dari Informasi dan Edukasi Narkoba Humas BNN: <http://dedinhumas.bnn.go.id>
- Brownfield, W. R. (2010). *International Narcotics Control Strategy Report- Volume 1 Drug and Chemical*. 171.
- Buzan, B. (1983). *People, State, and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

- Emers, R. (2003). *The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia : Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking and Sea Piracy*. 9.
- Fukuyama, F. (2004). , *State Building : Governance and World Order in the 21st*. London: Profile Books.
- Fuller, T. (2015, January 05). *Inside Myanmar's Opium Fields - The New York Times*. Dipetik Mei 17, 2016, dari www.nytimes.com:
<http://www.nytimes.com/times-insider/2015/01/05/inside-myanmars-opium-fields/>
- Ghosh, P. (2013, Oktober 13). *Burma's Godfather of Heroin Dies, But Drug Trade Flourishes as Rebels, Soldiers, Government Officials All Battle for Illegal Profits*. Dipetik Maret 5, 2016, dari International Business Times:
<http://www.ibtimes.com/burmas-godfather-heroin-dies-drug-trade-flourishes-rebels-soldiers-government-officials-all-battle>
- Harahap, P. (2015, Juni 15). *Jumlah Pengguna Narkoba di Indonesia*. Dipetik Maret 28, 2016, dari KOMPASIANA.com:
http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia_553ded8d6ea834b92bf39b35
- Hays, J. (2014, Mei). *OPIUM AND HEROIN IN MYANMAR / Facts and Details*. Dipetik Mei 17, 2016, dari factsanddetails.com:
http://factsanddetails.com/southeast-asia/Myanmar/sub5_5g/entry-3077.html#chapter-12
- Helen, J. (2006). *Security and Sustainable Development in Myanmar*. New York: Routledge.
- Isharyanto. (2010). www.kompasiana.com. Dipetik September 17, 2015
- Kurniawan, A. (2015, June 17). *Indonesia Negara "Weak State" Akut, Benarkah? - KOMPASIANA.com*. Dipetik Mei 16, 2016, dari www.kompasiana.com:
http://www.kompasiana.com/aniskurniawan/indonesia-negara-weak-state-akut-benarkah_54f357ff745513982b6c71ea
- Maryland, C. f. (t.thn.). *Amphetamine*. Dipetik maret 03, 2016, dari <http://www.cesar.umd.edu>
- Mas'ood, M. (1989). *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- ODPC. (2001). Country Profile "Myanmar". 23.
- Research, U. (2015). Southeast Asia Opium Survey. 78.

- Sabine, G. (1995). *A History of Political Theory*. London: George G Harrap & CO.Ltd.
- Soekanto, S. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Union, C. o. (2015). Regional Report on Southeast Asia and Chia. 6-15.
- UNODC. (2005). Myanmar Country Profile. 10-24.
- UNODC. (2013). Mekong MOu on Drug Control Sub-Regional Action Plan on Drug Control (Refision IX). 3-6.
- UNODC. (2014). Opium Cultivation in Southeast Asia 2014 : Myanmar, Laos, and Thailand.
- UNODC. (2015). Southeast Asia Opium Survey. 78.
- UNODC. (2015). World Drug Report . 12.
- www.bbc.com. (2016, Maret 15). *Parlemen myanmar Siap pilih Presiden Baru*. Dipetik Maret 15, 2016, dari BBC Indonesia:
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160314_dunia_myanmar_pi